

**HUBUNGAN PENGETAHUAN POLITIK DENGAN
TINGKAT PARTISIPASI POLITIK SISWA DALAM
PILKADA WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012
(Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Pendidikan*



Oleh:

SISRI RIZKY
2008/05562

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Hubungan Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partisipasi
Politik Siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun
2012 (Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)

Nama : Sisri Rizky

TM/NIM : 2008/ 05562

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph,D
NIP. 19581017 198503 1 001

Pembimbing II



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 19680212 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Jumat, 1 Februari 2013 pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

**Hubungan Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik Siswa
dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012
(Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)**

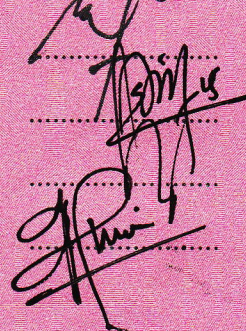
Nama : Sisri Rizky
TM/NIM : 2008/05562
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 1 Februari 2013

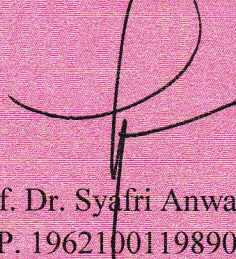
Tim Penguji:

Nama
Ketua : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D
Sekretaris : Dra. Al Rafni, M.Si
Anggota : Drs. Suryanef, M.Si
Anggota : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D

Tanda Tangan



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001198903 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul “ Hubungan Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik Siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012 (Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)” asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2013

Yang membuat pernyataan,



Sisri Rizky

NIM: 05562/2008

ABSTRAK

SISRI RIZKY (2008/05562):HUBUNGAN PENGETAHUAN POLITIK DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK SISWA DALAM PILKADA WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012 (Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Payakumbuh dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk melakukan partisipasi politik bagi masyarakat. Dengan demikian pemilih pemula sebagai bagian dari masyarakat harus memiliki pengetahuan politik yang tinggi agar bisa berpartisipasi dengan cerdas dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Payakumbuh dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 95 orang dan teknik pengambilan sampel adalah *total sampling*, yaitu sebanyak 95 orang. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran angket dan wawancara. Data yang terkumpul tersebut dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis Chi-square bantuan SPSS versi 19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Payakumbuh dikategorikan sedang, dan tingkat partisipasi politiknya dalam Pilkada Walikota Payakumbuh juga dikategorikan sedang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik pemilih pemula di SMA Negeri 1 Payakumbuh dalam Pilkada walikota Payakumbuh tahun 2012, dengan keeratan hubungan yang kuat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partispasi Politik Siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012 (Studi Pada SMA Negeri 1 Payakumbuh)”, tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs. M. Fachri Adnan M.Si. Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Drs. Suryanef, M.Si dan Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku ketua jurusan ISP dan Ibu Henni Muchtar, S.H, M.Hum selaku sekretaris jurusan beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Penasehat Akademis Bapak Junaidi Indrawadi SP.d, M.Pd penulis yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
5. Bapak Prof.Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan FIS UNP beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di SMA Negeri 1 Payakumbuh.
6. Bapak Drs. Resnulus selaku kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payakumbuh, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Payakumbuh.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan prodi PPKn 2008 yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teoritis	9
1. Pengetahuan Politik	9
2. Partisipasi Politik Siswa dalam Pilkada.....	16
B. Kerangka Konseptual	27
C. Hipotesis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Variabel Penelitian	30
D. Definisi Operasional Variabel	31
E. Populasi dan Sampel	34
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	36
H. Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian	37

I. Teknik Analisis Data	44
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	48
B. Analisis Data Penelitian	51
1. Deskripsi Variabel Penelitian	51
2. Analisis Hubungan antara Pengetahuan Politik dengan Tingkat Patisipasi Politik Siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012	55
3. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Daftar Kehadiran Pemilih dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012	4
2. Bentuk Partisipasi Politik (A. Almod)	18
3. Data Siswa SMAN 1 Payakumbuh yang Telah Berumur 17 Tahun.....	37
4. Skala Ukur Instrumen Penelitian	39
5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	40
6. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Politik	45
7. Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Partisipasi Politik Siswa	46
8. Hasil Reliabilitas Uji Coba	46
9. Rata-Rata Skor Pengetahuan Politik	54
10. Distribusi Frekuensi Tingkat Partisipasi Politik Pada Tahap Kampanye	57
11. Distribusi Frekuensi Tingkat Partisipasi Politik Pada Tahap Pemungutan Suara	59
12. Distribusi Frekuensi Tingkat Partisipasi Politik Pada Tahap Perhitungan Suara	60
13. Crosstab antara Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik	61
14. Analisis Chi-square	63
15. Hasil Analisis Koefisien Kontingensi	64

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	29
2. Pengetahuan Politik	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket Uji Coba	71
2. Tabulasi Uji Coba	78
3. Hasil Uji Coba	80
4. Angket Penelitian	84
5. Tabulasi Data Penelitian	91
6. Statistik Deskriptif	97
7. Distribusi Persentase Variabel Penelitian	107
8. Distribusi Frekuensi Skor Variabel	111
9. Tabel hasil penelitian	113
10. Pengkategorian Data Hasil Penelitian	116
11. Crosstabs	119
12. Syntax Variabel	121
13. Surat Izin Penelitian	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diyakini oleh pakar politik sebagai sistem terbaik dibandingkan dengan bentuk sistem pemerintahan yang lain. Salah satu keunggulan demokrasi adalah sistem ini paling memungkinkan bagi keberlangsungan proses seleksi dan suksesi secara *fair* bagi tampilnya pemimpin yang dianggap paling memiliki kompetensi, baik dari segi integritas maupun keahlian. Demokrasi merupakan lokus bagi penyaluran aspirasi dan hak politik rakyat. Aktualisasi demokrasi harus dilakukan melalui upaya-upaya bersama yang berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran dan kompetitif.

Menurut Yossihara (dalam Kalidjernih, 2010: 133) demokrasi di Indonesia masih tergolong semu, terlihat adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi, salah satunya pemilu yang bebas dan jujur. Sebab, rezim pemilu langsung justru melahirkan politik uang, kekerasan dan kecurangan lainnya. Suara rakyat menjadi komoditas yang bisa diperjual belikan, terutama dalam Pilkada. Rakyatpun menjadi pragmatis karena suara dianggap sebagai modal untuk memperoleh materi.

Ahmad Syafi'i Ma'arif (dalam Ubaedillah, 2008: 12) mengatakan bahwa demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi. Demokrasi meliputi proses dimana masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat

menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dalam pandangan Robert A. Dahl (dalam Zamroni, 2011: 17) terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dapat dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan berserikat. Namun demikian, demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-prinsip di atas, ia mempunyai parameternya sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya. Menurut Ubaidillah (2008: 18) ada tiga aspek yang bisa mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan disuatu negara, yakni:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintah.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam parlemen dan di dalam struktur pemerintahan. Unsur lain dari demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan

pemerintahan. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Menurut John Stuart Mill (dalam Ubaedillah, 2008:139) pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan politik. Pilkada dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan media berdemokrasi bagi masyarakat, dengan harapan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai dengan nurani.

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan Pilkada langsung adalah terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui Pilkada rakyat memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Memilih figur pemimpin secara langsung merupakan hal penting bagi suatu negara dan harus didukung oleh tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilih tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk negara.

Pilkada Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2012 masih memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah, hal ini terlihat dari masih tingginya angka golput atau masih banyaknya masyarakat Payakumbuh yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012. Sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1: Daftar kehadiran pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012

No	Uraian	Jumlah	%
1	Daftar pemilih tetap	83.837	100%
2	Menggunakan hak pilih	52.621	62,76%
3	Tidak menggunakan hak pilih	31.216	37,24%

Sumber: KPUD Kota Payakumbuh tahun 2012

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat proporsi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar cukup tinggi, yakni sebesar 37,24%. Menurut Sjachran (dalam Suharizal, 2011: 122) keterlibatan rakyat dalam pemerintah merupakan ciri mutlak dari demokrasi, yang juga berarti rakyat ikut berperan serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.

Dari 83.837 pemilih tetap yang terdaftar pada Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012, sebesar 12.576 pemilih merupakan pemilih yang berusia 17-21 tahun, yakni pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah atau yang disebut juga dengan pemilih pemula. Berarti 15% dari jumlah pemilih tetap merupakan pemilih pemula pada Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012. Ini bukanlah jumlah yang sedikit dan perolehan suara dari pemilih pemula sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada walikota Payakumbuh tahun 2012.

Pelajar atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan harus diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilihan kepala pemerintahan. Secara psikologis pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan

orang dewasa. Karena belum memiliki pengalaman memilih, pada umumnya banyak dari kalangan pemilih pemula yang belum mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Bahkan mereka tidak berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Fakta maraknya pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan temuan penulis pada SMA Negeri 1 Payakumbuh . Di SMA Negeri 1 Payakumbuh terdapat 95 orang siswa yang telah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2012. Hasil dari survei penulis dengan 95 orang siswa tersebut terdapat 41 orang siswa yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012. Hasil wawancara penulis dengan 10 orang siswa yang tidak menggunakan hak pilih adalah bahwa 7 orang siswa mengatakan mereka kurang peduli dengan pemilihan Walikota Payakumbuh dan 3 orang lagi mengatakan bahwa mereka tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012.

Bagi pemilih pemula ketidakjelasan tentang pandangan politik menjadi besar karena kebanyakan praktik kehidupan politik lebih menampilkan aspek negatif, sehingga menumbuhkan citra yang negatif juga. Menurut Sirozi (2007:160) merebaknya isu politik uang (*money politic*), apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang pemilu, rakyat akan menyalurkan hak suara mereka pada partai politik yang “*banyak duit*”, bukan pada partai politik yang memiliki program atau yang mereka yakini dapat meyalurkan aspirasi

rakyat. Selain itu adanya politik praktis memaksa kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu, sehingga mempengaruhi pembentukan kesadaran politik masyarakat. Dua orang kandidat Walikota Payakumbuh tahun 2012, yakni Mulyadi Afmar dan Amaysar merupakan alumni SMAN 1 Payakumbuh, hal ini akan menjadikan kandidat untuk bersaing mendapatkan suara dari pemilih pemula dari SMA 1 Payakumbuh, dikarenakan kedekatan emosional antara pemilih dan yang dipilih.

Pemahaman mengenai Pemilu ataupun Pilkada merupakan hal penting guna untuk membentuk pemilih yang cerdas. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi politik untuk meningkatkan kepekaan seseorang terhadap politik. Pengetahuan politik bisa didapat oleh masyarakat melalui pendidikan, media massa ataupun institusi politik. Sekolah sebagai sarana sosialisasi politik merupakan tempat yang banyak memberikan pengaruh terhadap terbentuknya pengetahuan politik siswa. Pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat yang dihasilkan oleh sosialisasi politik akan memberikan pengaruh kuat terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mendidik siswa menjadi warga negara yang kritis, aktif, demokratis dan beradab. Siswa dituntut untuk sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam paradigma barunya, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai bagian integral dari pendidikan demokrasi. Melalui model pendidikan ini diharapkan siswa memiliki kecakapan partisipatif dan bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya, karena meningkatnya gejala dan kecenderungan *political illiteracy* (tidak melek politik) dan meningkatnya *political apathism* (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik yang diharapkan adalah partisipasi yang mandiri dan otonom. Salah satu hal krusial yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik yang otonom adalah tingkat pengetahuan politik yang dimiliki oleh para pemilih dalam suatu *event* pemilu. Untuk itu menarik diteliti bagaimana hubungan antara pengetahuan politik siswa dengan tingkat partisipasi politik siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012, yang dilakukan di SMAN 1 Payakumbuh.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang teridentifikasi adalah

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kota Payakumbuh terhadap Pilkada Walikota Payakumbuh tahun 2012.
2. Masih banyak pemilih pemula di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terkontrol, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah hubungan pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik siswa dalam Pilkada walikota Payakumbuh tahun 2012 pada SMA Negeri 1 Payakumbuh.

D. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012 pada SMA Negeri 1 Payakumbuh ?”*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan politik dengan tingkat partisipasi politik siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012 pada SMA Negeri 1 Payakumbuh.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Politik dengan Tingkat Partisipasi Politik Siswa dalam Pilkada Walikota Payakumbuh Tahun 2012 (Studi Pada SMAN 1 Payakumbuh)” adalah :

1. Secara teoritis : penelitian ini sebagai salah satu kajian pendidikan politik, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan politik dan partisipasi politik siswa.
2. Secara praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam memberikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa.